

## **Analysis Of The Financial Performance Of The Regional Government Of The Meranti Islands District In The 2017-2021 Budget Year**

### **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017- 2021**

**Aditya Kusuma Rachman<sup>1\*</sup>, Siddig Alamsyah<sup>2</sup>, Kumba Digdowiseiso<sup>3</sup>**

Sekolah Pascasarjana, Universitas Nasional, Jakarta<sup>1,2,3</sup>

[kumba.digdo@civitas.unas.ac.id<sup>3</sup>](mailto:kumba.digdo@civitas.unas.ac.id)

\*Corresponding Author

---

#### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the regional financial management performance of the Meranti Islands District Government, Riau Province. This type of research is a quantitative descriptive research using secondary data. The data analysis used is to calculate the Regional Financial Independence Ratio, the Regional Financial Harmony Ratio, the Regional Financial Growth Ratio and the Regional Original Revenue Effectiveness Ratio (PAD). Based on the analysis of the Regional Financial Performance of the Regional Government of Meranti Islands Regency which was carried out in the 2017-2021 fiscal year period, it is known that the Regional Financial Independence Ratio shows an Instructive pattern relationship, the Regional Financial Harmony Ratio has imbalances in Operational Expenditure and Capital Expenditure, Regional Financial Growth Ratio at 2 (2) the last two years have experienced negative conditions, and the PAD Effectiveness Ratio shows that it is predominantly at a low level, namely below 100% or ineffective. Based on these findings it was concluded that the Financial Performance of the Meranti Islands District Government has not run optimally as expected with the fiscal decentralization function.*

**Keywords:** Performance; Independence; Compatibility; Growth; Effectiveness

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah menghitung Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilakukan pada periode tahun anggaran 2017-2021 diketahui bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan hubungan pola yang Instruktif, Rasio Keserasian Keuangan Daerahnya terdapat ketimpangan pada Belanja Operasional dan Belanja Modal, Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah pada 2 (dua) tahun terakhir mengalami kondisi negatif, dan Rasio Efektivitas PAD menunjukkan dominan berada di tingkat rendah yakni di bawah 100% atau tidak efektif. Berdasarkan beberapa temuan tersebut disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan dengan adanya fungsi desentralisasi fiskal.

**Kata Kunci:** Kinerja; kemandirian; Kesereasian; Pertumbuhan; Efektivitas

### **1. Pendahuluan**

Sebagai negara yang majemuk dan memiliki wilayah kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki bonus demografi dan wilayah luas sehingga berdampak pada tingkat kesulitan yang tinggi dalam mengatur urusan dalam negeri. Pemerintah pusat sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam urusan eksekutif memiliki beban berat dalam administrasi publik dimana keadaan ini justru akan memperlambat perwujudan cita-cita negara yang antara lain adalah mewujudkan kesejahteraan umum.

Percepatan perwujudan cita-cita itu salah satunya dapat ditempuh dengan pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (otonomi daerah) yang lebih

besar dalam mengatur daerahnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu aspek otonomi daerah dimaksud adalah aspek keuangan.

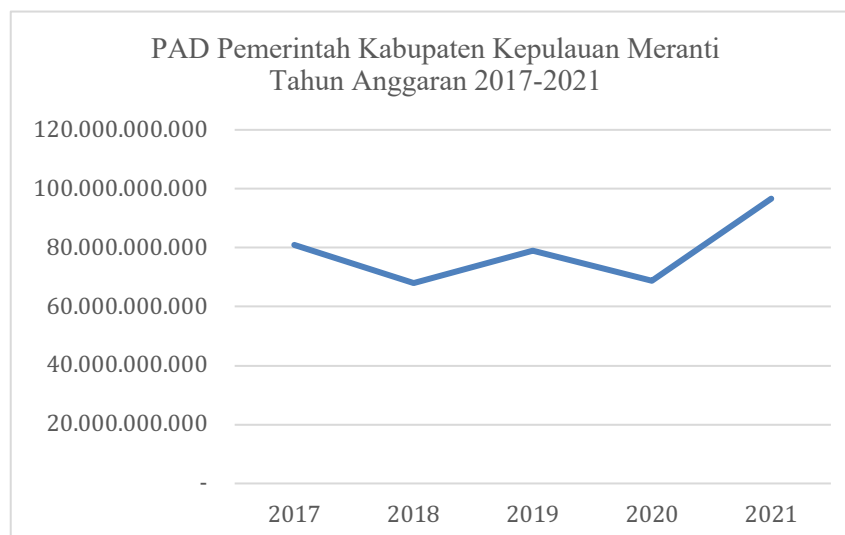
Pemerintah bersama DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang merupakan norma hukum atas administrasi antara keuangan pusat dan daerah. Diharapkan pemerintah daerah dengan otonomi daerahnya dapat mempunyai panduan dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

Dengan pengelolaan keuangan secara otonom ini, pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan pemerintah lebih mandiri, tidak terlalu banyak dan tidak selalu bergantung pada bantuan dari pusat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas (Digdowiseiso & Alfian, 2023). Pemerintah daerah dipandang sebagai pihak yang paling dekat dan paling memahami kondisi di daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat, sehingga ke semua tahapan pengelolaan keuangan daerah tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan di daerah dimaksud melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan setiap tahunnya.

Meskipun demikian, pemerintah pusat tidak serta-merta 'melepas' pemerintah daerah begitu saja. Di dalam UU HKPD disebutkan bahwa salah satu unsur dari Pendapatan Daerah adalah Dana Perimbangan yang merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan ini merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang kelak diharapkan besaran dana transfer ini akan berkurang seiring semakin mandirinya daerah dimaksud. Pemberian dana transfer ini tidak lepas dari belum meratanya kondisi tiap daerah di Indonesia, khususnya kemampuan daerah untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada penelitian terdahulu (Digdowiseiso & Alfian, 2023) Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2017-2021 menarik untuk diamati yang mana Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima mengalami fluktuatif dan diketahui bahwa target realisasi PAD pada kurun waktu tersebut mengalami kegagalan memenuhi target atau anggaran yang ditentukan. Kegagalan target tersebut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah riil yang berdampak pada tingginya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Bima akan bantuan pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer dari pemerintah pusat.

Keseriusan pemerintah daerah dalam menaikkan penerimaan PAD perlu didorong lagi. Sebagaimana yang telah diberitakan oleh media nasional bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan protesnya pada Kementerian Keuangan perihal ketidakadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) dengan alasan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai penghasil minyak sangat berharap pada DBH sebagai pemasukan Pendapatan Daerah, namun di sisi lain Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten miskin tertinggi di wilayah Provinsi Riau. Dari berita tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti masih menggantungkan PAD-nya pada dana transfer dari pemerintah pusat. Fenomena ini menarik untuk dianalisis dengan melihat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. Berdasarkan data DJPK Kementerian Keuangan, PAD pada Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami fluktuatif selama periode 2017-2021 sebagaimana dijabarkan pada tabel dan grafik berikut:



**Gambar 1. Grafik Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017-2021, data diolah**

Kemudian jika diamati pertumbuhan PAD pada periode tahun tersebut mengalami kondisi serupa, dimana pertumbuhannya mengalami fluktuatif bahkan ada pada kondisi minus, seperti yang ditampilkan pada tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Persentase Pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, data diolah**

Tahun	PAD	Persentase
2017	80.941.082.098	-
2018	68.006.356.887	- 15,98
2019	79.075.541.784	16,28
2020	68.885.900.802	- 12,89
2021	96.649.421.817	40,30

Hal ini menyebabkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak dapat lepas dari ketergantungan Dana Transfer Pemerintah Pusat. Detail lebih lanjutnya dituangkan dalam bentuk Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Beberapa indikator dapat digunakan dalam menganalisis kinerja ekonomi daerah, antara lain efisiensi, efektivitas, kemandirian ekonomi daerah, aktivitas dan pertumbuhan .

## 2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, daerah yang dijadikan obyek penelitian ada Kabupaten Kepulauan Meranti yang terletak pada Provinsi Riau dengan pengambilan data dari laman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan ([djpk.kemenkeu.go.id](http://djpk.kemenkeu.go.id)). Adapun Peneliti menggunakan metodologi analisis data sekunder. Sebagaimana dilansir (DqLab, 2021) analisis data sekunder merupakan analisis lebih lanjut dari himpunan data yang sudah ada yang memunculkan tafsiran, simpulan atau pengetahuan sebagai tambahan yang berbeda dari, apa yang telah disajikan dalam keseluruhan dan temuan utama penelitian terdahulu atau semula. Sedangkan menurut (Tripathy, 2013) analisis data sekunder adalah *the use of existing research data to find answer to a question that was different from the original work* atau penggunaan data riset yang telah ada untuk menjawab pertanyaan yang berbeda dari karya aslinya. Sehingga, dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data sekunder merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan data yang telah ada untuk tujuan tertentu oleh peneliti.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Populasi dan sampel yang digunakan adalah data Realisasi APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 s.d. 2021 yang sekaligus sebagai fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data yang dipublikasikan oleh DJPK Kementerian Keuangan. Teknik analisis data adalah proses mengolah data yang sudah terkumpul dari laman DJPK Kementerian Keuangan. Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah, menurut (Sugiyono, 2010) analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Beberapa tahap analisis atas data Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Tahun Anggaran 2017 s.d. 2021 menggunakan pengukuran sebagai berikut (Deswira, 2022) (1). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2). Rasio Keserasian Keuangan Daerah, (3). Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah dan (4). Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Letak, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu daerah di Provinsi Riau yang terletak di bagian pesisir timur pulau Sumatera dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triangle*) Indonesia – Malaysia – Singapore (IMS-GT) serta secara tidak langsung menjadi bagian dari *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tanjung Balai Karimun*.

Kemudian secara Topografis Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari gugusan pula dengan beberapa pulau besar, yaitu Tebingtinggi (1.438,83 km<sup>2</sup>), pulau Rangsang (922,10 km<sup>2</sup>), pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km<sup>2</sup>). Kabupaten Bima terletak di bagian timur pulau Sumatera dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : Selat Malaka, Kabupaten Bengkalis, Sebelah selatan : Kabupaten Siak, Kabupaten Sebelah Timur : Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Sebelah Barat : Kabupaten Bengkalis. Sedangkan Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah seluas 3.707,84 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 206.116 jiwa dengan kepadatan 56/km<sup>2</sup> (140/sq mi).

Selanjutnya Analisis laporan keuangan adalah alat yang digunakan untuk memahami masalah dan peluang yang ada dalam laporan keuangan, serta menggambarkan kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, pengukurannya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa Rasio Keuangan Daerah diantaranya adalah (1). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2). Rasio Keserasian Keuangan Daerah, (3). Rasio Pertumbuhan Keuangan Dearah, dan (4). Rasio Efektivitas PAD.

#### 1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2017-2021 berdasarkan Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan suatu daerah adalah kemampuan daerah membiayai dirinya sendiri, dapat berupa kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik. Kemandirian daerah merupakan cerminan dari partisipasi masyarakat, semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah maka semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam bentuk membayar pajak dan retribusi daerah.

Rasio Kemandirian keuangan daerah dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat dan Pinjaman}} \times 100$$

Berikut adalah penjelasan dari pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah pada tabel berikut:

**Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bima 2017-2021 Menurut Skala Interval**

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: (Halim, 2007)

Selanjutnya adalah gambaran dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

**Tabel 3. Rasio Kemandirian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun anggaran 2017-2021, data diolah**

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Persentase	Kemandirian Keuangan	Pola Hubungan
2017	80.941.082.098	724.244.592.606	11,18	Rendah Sekali	Insruktif
2018	68.006.356.887	781.602.610.877	8,70	Rendah Sekali	Insruktif
2019	79.075.541.784	884.353.281.057	8,94	Rendah Sekali	Insruktif
2020	68.885.900.802	823.023.644.635	8,37	Rendah Sekali	Insruktif
2021	96.649.421.817	834.399.613.201	11,58	Rendah Sekali	Insruktif

Pada Tabel 3 diatas diketahui bahwa pada periode lima tahun anggaran, Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat rendah sekali, memiliki ketergantungan kepada Dana Transfer yang pusat berikan. Kondisi seperti ini akan terus berlangsung jika Pemerintah Daerah tidak mengambil Tindakan berupa menaikkan target PAD beserta realisasinya.

2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 berdasarkan Rasio Keserasian

Rasio Keserasian bertujuan untuk melihat bagaimana Pemerintah mengoptimalkan dananya pada belanja operasional atau belanja modal, keduanya sangat berkaitan, jika pada suatu daerah pemerintahnya lebih banyak menghabiskan anggarannya pada Belanja Operasional maka kecil kemungkinan pemerintah daerah tersebut membelanjakan dananya pada sektor belanja modal, hal ini akan berpengaruh pada tidak bertambahnya asset untuk meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik

- a. Rasio Belanja Operasional

untuk menghitung Rasio Belanja Operasional menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

**Tabel 4. Rasio Belanja Operasional Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017-2021, data diolah**

Tahun	Belanja		Persentase
	Operasioanal	Total Belanja	
2017	64.208.769.176	69.293.731.180	47,89
2018	558.980.147.497	1.042.026.366.106	53,64
2019	497.364.344.422	1.206.584.262.782	41,22

Belanja			
Tahun	Operasioanal	Total Belanja	Persentase
2020	551.603.676.471	1.112.506.030.850	49,58
2021	551.603.676.471	1.010.160.229.554	54,61

Berdasarkan tabel 4 tersebut diketahui bahwa pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan, yang dimungkinkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga menurunnya aktifitas perkantoran yang menyebabkan Belanja Operasional mengalami penurunan, yang kemudian mengalami kenaikan Kembali di tahun 2021.

b. Rasio Belanja Modal

Menghitung Rasio Belanja Modal dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100$$

**Tabel 5. Rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017-2021, data diolah**

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Persentase
2017	173.835.960.832	969.293.731.180	17,93
2018	169.802.769.847	1.042.026.366.106	16,30
2019	290.696.070.450	1.206.584.262.782	24,09
2020	215.085.256.949	1.112.506.030.850	19,33
2021	105.173.140.235	1.010.160.229.554	10,41

Data yang disajikan pada tabel 5 menunjukkan bahwa persentase Belanja Modal lebih kecil porsinya dibandingkan dengan pengeluaran pada Belanja Operasional.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010).

$$\text{Rasio Pertumbuhan (r)} = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100$$

Keterangan:

P<sub>n</sub>= Pendapatan, belanja yang dihitung tahun n (tahun berjalan)

P<sub>o</sub>= Pendapatan, belanja, yang dihitung tahun 0 (tahun sebelumnya)

r= Rasio Pertumbuhan

Berikut adalah gambaran Rasio Pertumbuhan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, rasio yang digunakan adalah menghitung Total Belanja yang dikeluarkan dengan perbandingan pada pengeluaran belanja tahun sebelumnya

**Tabel 6. Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017-2021, data diolah**

Tahun	Total Belanja (P <sub>n</sub> )	Total Belanja (P <sub>o</sub> )	(P <sub>n</sub> -P <sub>o</sub> )	Persentase
2017	969.293.731.180	1.023.128.864.643	-53.835.133.463	-5,26
2018	1.042.026.366.106	969.293.731.180	72.732.634.925	7,50
2019	1.206.584.262.782	1.042.026.366.106	164.557.896.676	15,79
2020	1.112.506.030.850	1.206.584.262.782	-94.078.231.932	-7,80
2021	1.010.160.229.554	1.112.506.030.850	-102.345.801.296	-9,20

Berdasarkan tabel 6 di atas tergambar bahwa Rasio Pertumbuhan cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 diketahui pertumbuhan mengalami minus, dan kemudian ditahun berikutnya mengalami perbaikan pertumbuhan sebesar positif 7,50%, berlanjut pada tahun

2019 pertumbuhan naik ke angka 15,79%. Pada tahun 2019 berbarengan dengan wabah covid-19 mengalami penurunan yang tajam, dan berlanjut pada tahun 2021.

#### 4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas merupakan gambaran kesesuaian target PAD yang ditetapkan dengan realisasi PAD nya, artinya pemerintah dianggap mampu atau tidak dalam menggalang PAD berdasarkan jumlah PAD yang terealisasi.

Untuk menghitung Rasio Efektivitas PAD dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100$$

Berikut pada tabel 7. adalah kategorisasi Rasio Efektivitas Keuangan Daerah berdasarkan realisasi PAD:

**Tabel 7. Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Kriteria Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	Rasio Efektivitas (%)
Efektif	$X > 100$
Efektif Berimbang	$X = 100$
Tidak Efektive	$X < 100$

Sumber: (Halim, 2007)

Hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

**Tabel 8. Rasio Efektivitas PAD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2017-2021, data diolah**

Tahun	PAD	Target Penerimaan PAD	Persentase
2017	80.941.082.098	63.000.000.000	128,48
2018	68.006.356.887	81.160.000.000	83,79
2019	79.075.541.784	83.070.000.000	95,19
2020	68.885.900.802	105.780.000.000	65,12
2021	96.649.421.817	204.310.000.000	47,31

Berdasarkan data pada tabel 8 di atas, diketahui pada periode 5 (lima) tahun kebelakang, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam merealisasikan Target PAD nya pada tahun 2017 masuk ke dalam kategori Efektif, karena nilai Rasio Efektivitasnya di atas 100%, sayangnya pada tahun-tahun berikutnya mengalami ke tidak konsistenan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti dalam mengawal Realisasi PAD agar sesuai dengan target yang ditetapkan. Tahun 2018 sampai dengan 2021 berturut-turut berada pada status Rasio Efektivitas yang tidak efektif.

#### 4. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan hasil Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diketahui bahwa pada periode tahun anggaran 2017-2021 Pemerintah Kabupaten Meranti secara umum belum berjalan secara optimal dikarenakan oleh penyebab faktor berikut: (1). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada kategori rendah sekali dengan pola hubungan yang instruktif, (2). Rasio Keserasian antara Belanja Modal dan Belanja Operasional mengalami ketimpangan, (3). Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah mengalami

penurunan yang drastis pada periode tahun 2019 dan (4). Rasio Efektifitas PAD berada pada kondisi yang tidak efektif.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu merumuskan suatu formulasi yang dapat menaikkan PAD dan meningkatkan pengeluaran berupa belanja modal, dari kedua formulasi tersebut tentunya akan mempengaruhi kenaikan Tingkat Kemandirian daerah dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

#### Daftar Pustaka

- Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Akuntansi dan Manajemen*, 72-88.
- Digdowiseiso, K., & Alfian, M. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2017- 2021. *JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION*, 4(1), 247-258. Retrieved from [ejournal.nusantaraglobal.ac.id: https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/576/631](https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige/article/view/576/631)
- DqLab, D. (2021, February 23). *Analisis Data Sekunder adalah Salah Satu Jenis Analisis yang...* Retrieved July 14, 2023, from DQLab: <https://dqlab.id/analisis-data-sekunder-adalah-salah-satu-jenis-analisis-yang-penting>
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tripathy, J. P. (2013). Secondary Data Analysis: Ethical Issues and Challenges. *Iran Journal of Public Health*, 42(12), 1478–1479. Retrieved from National Library of Medicine: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4441947/#:~:text=Secondary%20analysis%20refers%20to%20the,as%20part%20of%20personal%20research>.